

TESIS

ANALISIS PENGARUH AKUNTABILITAS DAN
TRANSPARANSI PENGELOLAAN KEUANGAN DAERAH
TERHADAP KINERJA PEMERINTAH DAERAH
DI KABUPATEN GOWA

ANALYSIS THE EFFECT OF ACCOUNTABILITY AND
TRANSPARENCY OF REGIONAL FINANCIAL MANAGEMENT
ON THE PERFORMANCE OF LOCAL GOVERNMENTS
IN GOWA DISTRICT

disusun dan diajukan oleh

MULYATI FIRMAN
A042191010



Kepada

PROGRAM MAGISTER KEUANGAN DAERAH
FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS
UNIVERSITAS HASANUDDIN
MAKASSAR
2021

TESIS

ANALISIS PENGARUH AKUNTABILITAS DAN
TRANSPARANSI PENGELOLAAN KEUANGAN DAERAH
TERHADAP KINERJA PEMERINTAH DAERAH
DI KABUPATEN GOWA

ANALYSIS THE EFFECT OF ACCOUNTABILITY AND
TRANSPARENCY OF REGIONAL FINANCIAL MANAGEMENT
ON THE PERFORMANCE OF LOCAL GOVERNMENTS
IN GOWA DISTRICT

sebagai persyaratan untuk memperoleh gelar magister

disusun dan diajukan oleh

MULYATI FIRMAN
A042191010



kepada

PROGRAM MAGISTER KEUANGAN DAERAH
FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS
UNIVERSITAS HASANUDDIN
MAKASSAR
2021

TESIS

ANALISIS PENGARUH AKUNTABILITAS DAN TRANSPARANSI PENGELOLAAN KEUANGAN DAERAH TERHADAP KINERJA PEMERINTAH DAERAH DI KABUPATEN GOWA

ANALYSIS THE EFFECT OF ACCOUNTABILITY AND TRANSPARENCY OF REGIONAL FINANCIAL MANAGEMENT ON THE PERFORMANCE OF LOCAL GOVERNMENTS IN GOWA DISTRICT

disusun dan diajukan oleh

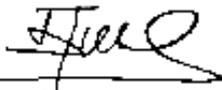
MULYATI FIRMAN
A042191010

Telah diperiksa dan disetujui untuk diuji

Makassar, Januari 2021

Komisi Penasihat

Ketua



Prof. Dr. Sumardi, SE., M.Si
NIP 19560505 198503 1 002

Anggota



Dr. Nirwana, SE., Ak., M.Si., CA
NIP 19651127 199103 2 001

Ketua Program Studi Magister Keuangan Daerah
Fakultas Ekonomi dan Bisnis
Universitas Hasanuddin



Dr. Mursalim Nohong, S.E., M.Si.
NIP 19710619 200003 1 001

LEMBAR PENGESAHAN (TUGAS AKHIR)

**ANALISIS PENGARUH AKUNTABILITAS DAN TRANSPARANSI PENGELOLAAN
KEUANGAN DAERAH TERHADAP KINERJA PEMERINTAH DAERAH
DI KABUPATEN GOWA**

**ANALYSIS THE EFFECT OF ACCOUNTABILITY AND TRANSPARENCY OF REGIONAL
FINANCIAL MANAGEMENT ON THE PERFORMANCE OF LOCAL GOVERNMENTS
IN GOWA DISTRICT**

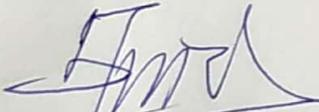
Disusun dan diajukan oleh

**MULYATI FIRMAN
A042191010**

Telah dipertahankan di hadapan Panitia Ujian yang dibentuk dalam rangka Penyelesaian
Magister Program Studi Magister Keuangan Daerah Fakultas Ekonomi dan Bisnis
Universitas Hasanuddin
pada tanggal **11 Februari 2021**
dan dinyatakan telah memenuhi syarat kelulusan

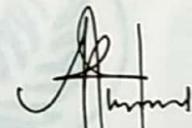
Menyetujui,

Pembimbing Utama,



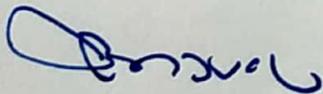
Prof. Dr. Sumardi, SE., M.Si.
NIP 19560505 198503 1 002

Pembimbing Pendamping,



Dr. Nirwana, SE., Ak., M.Si., CA.
NIP 19651127 199103 2 001

Ketua Program Studi,



Dr. Mursalim Nohong, S.E., M.Si.
NIP 19710619 200003 1 001



Dekan Fakultas/Sekolah Pascasarjana,

Prof. Dr. Abd. Rahman Kadir, S.E., M.Si.
NIP 19640205 198810 1 001

PERNYATAAN KEASLIAN

Yang bertanda tangan di bawah ini ,

Nama : Mulyati Firman
NIM : A042191010
Program studi : Magister Keuangan Daerah
Jenjang : S2

Menyatakan dengan ini bahwa karya tulisan saya berjudul

ANALISIS PENGARUH AKUNTABILITAS DAN TRANSPARANSI PENGELOLAAN KEUANGAN DAERAH TERHADAP KINERJA PEMERINTAH DAERAH DI KABUPATEN GOWA

adalah karya tulisan saya sendiri dan bukan merupakan pengambilalihan tulisan orang lain ; bahwa tesis yang saya tulis ini benar-benar merupakan hasil karya saya sendiri.

Apabila di kemudian hari terbukti atau dapat dibuktikan bahwa sebagian atau keseluruhan tesis ini hasil karya orang lain, maka saya bersedia menerima sanksi atas perbuatan tersebut.

Makassar, 11 Februari 2021
Yang membuat pernyataan



Mulyati Firman

PRAKATA

Puji syukur peneliti panjatkan kepada Tuhan Yang Maha Esa atas berkat dan karunia-Nya sehingga peneliti dapat menyelesaikan tesis ini. Tesis ini merupakan tugas akhir untuk mencapai gelar Magister Sains (M.Si) pada Program Pendidikan Magister Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Hasanuddin.

Peneliti mengucapkan terima kasih kepada semua pihak yang telah membantu peneliti menyelesaikan tesis ini, secara khusus kepada para pembimbing, yang dengan antusiasnya mengarahkan peneliti dalam setiap proses tesis ini.

Ucapan terima kasih yang sama peneliti sampaikan kepada para pihak baik itu para responden, para staff di tempat peneliti melakukan penelitian, dan pihak lainnya yang dengan caranya masing-masing telah memberikan dukungan kepada peneliti untuk menyelesaikan tesis ini.

Terakhir peneliti menyampaikan salam sayang dan takzim kepada kedua orang tua, suami, anak-anak dan seluruh keluarga besar yang selalu mendoakan dan memberikan dukungan moril kepada peneliti untuk tetap semangat menyelesaikan penelitian ini.

Tesis ini jauh dari kata sempurna, namun semoga ini bisa menjadi lompatan besar bagi kehidupan pribadi peneliti agar tak henti-hentinya menimba ilmu, dan semoga pula hasil penelitian ini mampu memberikan masukan bagi para pihak yang berkepentingan. *Non Scholae sed Vitae Discimus (Belajar tidak untuk sekolah semata, tetapi belajarlah untuk memperkaya kehidupanmu).*

Makassar, 11 Februari 2021

Peneliti

ABSTRAK

ANALISIS PENGARUH AKUNTABILITAS DAN TRANSPARANSI PENGELOLAAN KEUANGAN DAERAH TERHADAP KINERJA PEMERINTAH DAERAH DI KABUPATEN GOWA

Mulyati Firman

Sumardi

Nirwana

Penelitian ini bertujuan untuk menguji dan menganalisis pengaruh akuntabilitas dan transparansi pengelolaan keuangan daerah terhadap kinerja pemerintah daerah di kabupaten gowa. Dalam penelitian ini, metode yang digunakan peneliti adalah metode deskriptif kuantitatif. Sampel dalam penelitian ini adalah SKPD di lingkungan pemerintah daerah Kabupaten Gowa dengan responden kepala badan, sekretaris, kepala bidang, kepala seksi maupun staf dari masing-masing SKPD yang terlibat dalam proses-proses pengelolaan keuangan daerah. Jenis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah data primer. Pengumpulan data dalam penelitian yaitu penelitian lapangan (*field research*) dan studi kepustakaan (*library research*). Variabel dalam penelitian ini adalah Akuntabilitas Pengelolaan Keuangan Daerah (X1) , Transparansi Pengelolaan Keuangan Daerah(X2), Kinerja Pemerintah Daerah (Y). Alat bantu pengujian yang digunakan adalah program SPSS. Dan akan diuji dengan teknik metode analisis regresi berganda dan regresi interaksi atau dikenal dengan istilah Moderated Regresion Analysis (MRA).

Kata Kunci : Akuntabilitas, Transparansi, Pengelolaan Keuangan

ABSTRACT

*Analysis The Effect Of Accountability And Transparency
Of Regional Financial Management On The Performance Of
Local Governments In Gowa District*

Mulyati Firman

Sumardi

Nirwana

This study aims to examine and analyze the effect of accountability and transparency of regional financial management on the performance of local governments in gowa district. In this study, the method used by researchers is quantitative descriptive method. The sample in this research is SKPD within the local government of Gowa Regency with the head of the respondent, the secretary, the head of the field, the head of the section and the staff of each SKPD who are involved in the regional financial management process. The type of data used in this study is primary data. Collecting data in research is field research (field research) and library research (library research). The variables in this study are Accountability of Regional Financial Management (X1), Transparency of Regional Financial Management (X2), Performance of Local Government Agencies (Y). The testing tool used is the SPSS program. And will be tested with multiple regression analysis techniques and interaction regression or known as Moderated Regression Analysis (MRA).

Keywords : *Accountability, Transparency, Financial Management*

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL	ii
HALAMAN PERSETUJUAN	iii
HALAMAN PENGESAHAN.....	iv
PERNYATAAN KEASLIAN PENELITIAN	v
PRAKATA	vi
ABSTRAK	vii
<i>ABSTRACT</i>	viii
DAFTAR ISI	ix
DAFTAR TABEL	xii
DAFTAR LAMPIRAN	xiv
DAFTAR GAMBAR.....	xv
 BAB I PENDAHULUAN	
1.1 Latar Belakang Masalah	1
1.2 Rumusan Masalah.....	12
1.3 Tujuan Penelitian	13
1.4 Manfaat Penelitian	13
 BAB II TINJAUAN PUSTAKA	
2.1 Tinjauan Teoritis	16
2.1.1 Teori Stewardship	16
2.1.2 Akuntabilitas Pengelolaan Keuangan Daerah.....	18
2.1.3 Transparansi Pengelolaan Keuangan Daerah	20
2.1.4 Akuntabilitas.....	22
2.1.5 Transparansi.....	31
2.1.6 Kinerja Pemerintah	33
2.2 Hubungan Antar Variabel.....	34
2.2.1 Hubungan akuntabilitas dengan kinerja pemerintah	34

2.2.2 Hubungan transparansi dengan kinerja pemerintah	35
3.2 Penelitian Terdahulu	36

BAB III KERANGKA KONSEPTUAL DAN HIPOTESIS

3.1 Kerangka konseptual	38
3.1.1 Hipotesis.....	39
3.1.2 Pengaruh akuntabilitas pengelolaan keuangan daerah terhadap kinerja pemerintah daerah.....	39
3.1.3 Pengaruh transparansi pengelolaan keuangan daerah terhadap kinerja pemerintah daerah.....	41

BAB IV METODE PENELITIAN

4.1 Rancangan penelitian	45
4.2 Lokasi dan waktu penelitian	45
4.3 Populasi dan sampel penelitian	45
4.4 Jenis dan sumber data.....	48
4.5 Metode pengumpulan data	50
4.6 Metode analisis data	51
4.6.1 Statistik Deskriptif.....	51
4.6.2 Uji Kualitas Data.....	52
4.6.3 Uji Asumsi Klasik.....	53
4.6.4 Uji Hipotesis	54

BAB V ANALISIS DATA DAN PEMBAHASAN

5.1 Analisis Data	58
5.1.1 Karakteristik Responden	58
5.1.2 Deskripsi Variabel Data	61
5.1.3 Hasil Uji Kualitas Data	67
5.1.4 Uji Asumsi Klasik.....	68
5.1.5 Uji Analisis Regresi Linear Berganda	71
5.1.6 Uji Hipotesis	72
5.2 Pembahasan Hasil Penelitian	77
5.2.1 Pengaruh Akuntabilitas Pengelolaan Keuangan Daerah terhadap Kinerja Pemerintah Daerah	77

5.2.2 Pengaruh Transparansi Pengelolaan Keuangan Daerah terhadap Kinerja Pemerintah Daerah	80
BAB VI PENUTUP	
6.1 Kesimpulan	83
6.2 Saran	84
DAFTAR PUSTAKA.....	85

DAFTAR TABEL

Tabel	Halaman
4.1 Jumlah Sampel	47
4.2 Definisi Operasional Variabel	49
5.1 Sebaran Responden Menurut Jenis Kelamin	58
5.2 Sebaran Responden Menurut Umur.....	59
5.3 Sebaran Responden Menurut Tingkat Pendidikan	59
5.4 Sebaran Responden Menurut Masa Kerja	60
5.5 Sebaran Responden Menurut Latar Belakang Pendidikan....	60
5.6 Sebaran Responden Menurut Jabatan.....	61
5.7 Distribusi Frekuensi Variabel Akuntabilitas.....	62
5.8 Distribusi Frekuensi Variabel Transparansi	63
5.9 Distribusi Frekuensi Variabel Kinerja Pemerintah Daerah	65
5.10 Hasil Uji Validitas.....	67
5.11 Hasil Uji Reliabilitas	68
5.12 Hasil Uji Multikolinearitas.....	69
5.13 Hasil Perhitungan Regresi.....	72
5.14 Hasil Uji Beta	73
5.15 Hasil Uji Determinasi	73
5.16 Hasil Uji T	74

5.17 Hasil Uji F 76

DAFTAR LAMPIRAN

Lampiran	Halaman
1. Tabulasi Skor Kuesioner Akuntabilitas Pengelolaan Keuangan Daerah	87
2. Tabulasi Skor Kuesioner Transparansi Pengelolaan Keuangan Daerah	91
3. Tabulasi Skor Kuesioner Kinerja Pemerintah Daerah	95
4. Distribusi Karakteristik Responden	99
5. Distribusi Tanggapan Responden	101
6. Uji Validitas	105
7. Uji Reliabilitas.....	108
8. Uji Multikolinearitas	111
9. Uji Heterokedastisitas.....	112
10. Uji Normalitas	113
11. Analisis Regresi Linier Berganda	114
12. Uji Beta.....	115
13. Uji Determinasi	116
14. Uji-T.....	117
15. Uji-F.....	118

DAFTAR GAMBAR

Gambar	Halaman
3.1 Kerangka Konseptual.....	39
5.1 Grafik Scatterplot	70
5.2 Grafik Normal Probability Plot	71

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang Masalah

Kinerja pemerintah didefinisikan sebagai hasil dari kegiatan dan program pemerintah yang hendak atau telah dicapai sehubungan dengan penggunaan anggaran dengan kuantitas dan kualitas terukur (PP Nomor 8 Tahun 2006). Menurut Nordiawan (2010) kinerja pemerintah tidak bisa dilihat hanya dari sisi input dan output tetapi juga dari sisi outcome, manfaat dan dampaknya terhadap kesejahteraan masyarakat. Untuk menilai kinerja Pemerintah Daerah dilakukan Evaluasi Kinerja Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah yang selanjutnya disebut EKPPD. EKPPD merupakan penilaian kinerja berdasarkan LPPD (Laporan Pertanggungjawaban Penyelenggaraan Pemerintah Daerah), LAKIP (Laporan Kinerja Instansi Pemerintah), informasi keuangan daerah dan laporan-laporan lainnya yang dibuat oleh pemerintah sebagai pertanggungjawaban penyelenggaraan pemerintahan (Permendagri Nomor 73 Tahun 2009).

Kinerja pemerintah daerah dalam memajukan pembangunan dalam berbagai bidang menjadi hal yang sangat penting bagi pemerintah daerah dalam mencapai tujuan pemerintah untuk menjadi tata pemerintahan yang baik (Good Governance). Undang-undang Nomor 22 dan 25 Tahun 1999

tentang Pemerintahan Daerah dan Keuangan Daerah yang selanjutnya diubah oleh Undang-undang nomor 32 dan 33 tahun 2004, telah mengantarkan Indonesia memasuki proses pemerintahan desentralisasi setelah lebih dari 30 tahun berada di bawah rezim orde baru yang serba sentralistis. Implementasi kedua undang-undang tersebut menjadi momentum perpindahan pengawasan, sumber daya fiskal, otonomi politik dan tanggung jawab pelayanan publik dari pemerintah pusat kepada pemerintah daerah. Selama rentang perpindahan yang lebih dari satu dasawarsa ini, berbagai pengalaman lokal yang heterogen telah muncul ke permukaan, seiring longgarnya pengawasan pusat atas daerah dan meningkatnya wewenang dan tanggung jawab pemerintah daerah dalam memberikan pelayanan publik. Berpindahannya sebagian tanggung jawab penyelenggaraan negara ke daerah ini, tentu saja harus didukung oleh kesiapan daripada stakeholder penyelenggara daerah.

Kinerja anggaran pemerintah daerah selalu dikaitkan dengan bagaimana sebuah unit kerja pemerintah daerah dapat mencapai tujuan kerja dengan alokasi anggaran yang tersedia. Kinerja merupakan pencapaian atas apa yang telah direncanakan, baik oleh pribadi maupun organisasi (Nugroho dan Rohman, 2012).

Pengukuran kinerja instansi pemerintah daerah juga dapat dilakukan dengan menggunakan pendekatan *balanced scorecard*. Pengukuran kinerja dilakukan berdasarkan empat perspektif *balanced scorecard*, yaitu perspektif keuangan, perspektif pelanggan, perspektif

proses bisnis internal, dan perspektif pertumbuhan dan pembelajaran.

Menurut Nawawi (2006), *balanced scorecard* merupakan pengembangan dari cara pengukuran keberhasilan organisasi/perusahaan dengan cara mengintegrasikan beberapa teknik pengukuran atau penilaian kinerja yang terpisah-pisah yang terdiri atas empat perspektif. Empat perspektif *Balanced Scorecard* meliputi: perspektif keuangan, perspektif pelanggan, perspektif proses bisnis internal serta perspektif pembelajaran dan pertumbuhan.

Berdasarkan penilaian dari perspektif keuangan, kinerja keuangan diukur menggunakan pendekatan *value for money* dengan menganalisis efisiensi dan efektifitas anggaran dari sisi ekonomis, efisiensi, dan efektivitas.

Berdasarkan penilaian dari perspektif pelanggan, pengukuran kinerja digunakan untuk mengetahui bagaimana respon pelanggan terhadap pelayanan yang yang diberikan oleh instansi pemerintah. Kualitas layanan jasa dapat dievaluasi dengan dimensi-dimensi karakteristik jasa. Parasuraman, dkk (1988) menemukan lima dimensi karakteristik yang dapat digunakan untuk mengevaluasi kualitas layanan. Kelima dimensi tersebut yaitu dimensi bukti fisik (*tangible*), dimensi kehandalan (*reliability*), dimensi daya tanggap (*responsiveness*), dimensi jaminan (*assurance*) dan dimensi perhatian (*emphaty*).

Berdasarkan penilaian dari perspektif proses bisnis internal, pengukuran kinerja dilakukan untuk mendukung pelaksanaan program

dan kegiatan, yang meliputi sarana prasarana kantor, ketersediaan SDM serta tata cara proses pelaksanaan kegiatan dalam mencapai visi misi organisasi. Perspektif proses bisnis internal terdapat tiga dimensi yaitu dimensi fasilitas, dimensi sumber daya manusia, dan dimensi proses.

Penilaian yang ke empat yaitu berdasarkan perspektif pembelajaran dan pertumbuhan. Menurut Setyawan (2018), perspektif pertumbuhan dan pembelajaran terdapat dua dimensi pengukuran yaitu dimensi kemampuan dan dimensi motivasi. Dimensi kemampuan merupakan pengukuran kualitas kinerja yang meliputi tingkat kepuasan pegawai terhadap kebijakan instansi terkait upaya meningkatkan pengetahuan dan kemampuan pegawai guna mendukung peningkatan kinerja organisasi. Sedangkan dimensi motivasi merupakan pengukuran kualitas kinerja terkait tingkat kepuasan pegawai terhadap kebijakan instansi dalam meningkatkan motivasi pegawai dalam bekerja.

Terkait dengan kinerja pemerinah daerah, berdasarkan hasil temuan Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) RI yang dilakukan di Kabupaten Gowa diketahui bahwa Dana SILPA Rp 92 miliar ternyata sudah lama mengendap di bank. Sejak 31 Desember 2019, dana tersebut belum juga digunakan. Kepala BPKD Gowa mengatakan bahwa dana SILPA yang tersimpan di bank tidak dalam bentuk deposito, tetapi berupa giro. Kepala BPKD Gowa mengaku seluruh laporan kas dana SILPA sudah dihitung BPK. Pengujiannya sudah dilakukan. Sehingga SILPA yang ada akan digunakan dalam APBD perubahan tahun 2020 jika sudah

mendapat persetujuan.

Namun pembahasan itu membingungkan para anggota dewan. Sebab, beberapa kepala dinas yang dihadirkan untuk melaporkan dana sisa anggarannya, ada perbedaan angka dengan laporan Tim Anggaran Pemerintah Daerah (TAPD). Hal tersebut menunjukkan bahwa kinerja pemerintah daerah di kabupaten gowa masih harus diperbaiki.

Penelitian terkait kinerja pemerintah daerah pernah dilakukan oleh Sopyan Badruzzaman (2018), dimana hasilnya penelitian menyatakan bahwa terdapat pengaruh positif dan signifikan antara akuntabilitas dan transparansi pengelolaan keuangan daerah terhadap kinerja pemerintah daerah.

Menurut Mardiasmo (2009) dalam organisasi sektor publik memiliki 3 fungsi utama: (1) Pelayanan publik dilakukan secara vital bagi kepentingan umum, (2) Dapat mendefinisikan prinsip operasional masyarakat, (3) Menyediakan dan melakukan pelayanan publik yang diperlukan karena tidak ada sektor swasta atau nirlaba yang ingin menanganinya. Sebagai organisasi sektor publik, pemerintah daerah dituntut untuk memiliki kinerja yang mengutamakan kepentingan masyarakat terhadap pertanggung jawaban penyelenggaraan pemerintah yang transparan dan berkualitas. Pertanggung jawaban sangat penting dilakukan terhadap kinerja pemerintah yang diharapkan dapat meningkatkan dalam pelayanan terhadap masyarakat serta melakukan evaluasi kinerja tahun yang lalu untuk menjadikan dasar dalam pedoman

penyusunan tahun yang selanjutnya. Fakta yang terjadi di dalam praktik di lapangan masih terdapat beberapa penyimpangan yang dilakukan oleh pihak-pihak yang merupakan oknum dari pemerintah. Salah satu penyimpangan yang masih sering terjadi adalah lemahnya pengendalian yang dilakukan dalam kegiatan-kegiatan pembangunan serta masih terdapat penyelewengan dana yang digunakan untuk kegiatan diluar rencana pembangunan. Hal ini menyebabkan adanya beberapa tujuan dari instansi pemerintah yang telah direncanakan tidak tercapai.

Laporan keuangan pemerintah harus menyediakan informasi yang dapat dipakai oleh pengguna laporan keuangan untuk menilai akuntabilitas pemerintahan dalam membuat keputusan ekonomi, sosial dan politik. Akuntabilitas diartikan sebagai hubungan antara pihak yang memegang kendali dan mengatur entitas dengan pihak yang memiliki kekuatan formal atas pihak pengendali tersebut. Dalam hal ini dibutuhkan juga pihak ketiga yang accountable untuk memberikan penjelasan atau alasan yang masuk akal terhadap seluruh kegiatan yang dilakukan dan hasil usaha yang diperoleh sehubungan dengan pelaksanaan suatu tugas dan pencapaian suatu tujuan tertentu. Dalam konteks penyelenggaraan pemerintahan, akuntabilitas pemerintah tidak dapat diketahui tanpa pemerintah memberitahukan kepada rakyat tentang informasi sehubungan dengan pengumpulan sumber daya dan sumber dana masyarakat beserta penggunaannya.

Akuntabilitas dapat dipandang dari berbagai perspektif. Dari

perspektif akuntansi, *American Accounting Association* menyatakan bahwa akuntabilitas suatu entitas pemerintahan dapat dibagi dalam empat kelompok, yaitu akuntabilitas terhadap: 1) sumber daya finansial, 2) kepatuhan terhadap aturan hukum dan kebijaksanaan administratif, 3) efisiensi dan ekonomisnya suatu kegiatan, 4) hasil program dan kegiatan pemerintah yang tercermin dalam pencapaian tujuan, manfaat dan efektivitas.

Sedangkan dari perspektif fungsional, akuntabilitas dilihat sebagai suatu tingkatan dengan lima tahap yang berbeda yang diawali dari tahap yang lebih banyak membutuhkan ukuran-ukuran obyektif (*legal compliance*) ke tahap yang membutuhkan lebih banyak ukuran-ukuran subyektif. Tahap-tahap tersebut adalah: 1) *probity and legality accountability*, hal ini menyangkut pertanggungjawaban penggunaan dana sesuai dengan anggaran yang telah disetujui dan sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku (*compliance*), 2) *process accountability* dalam hal ini digunakan proses, prosedur, atau ukuran-ukuran dalam melaksanakan kegiatan yang ditentukan (*planning, allocating and managing*), 3) *performance accountability*, pada level ini dilihat apakah kegiatan yang dilakukan sudah efisien (*efficient and economy*), 4) *program accountability* di sini akan disoroti penetapan dan pencapaian tujuan yang telah ditetapkan tersebut (*outcomes and effectiveness*), 5) *policy accountability*, dalam tahap ini dilakukan pemilihan berbagai kebijakan yang akan diterapkan atau tidak (*value*).

Dari perspektif sistem akuntabilitas, terdapat beberapa karakteristik pokok sistem akuntabilitas ini yaitu : 1) berfokus pada hasil (*outcomes*), 2) menggunakan beberapa indikator yang telah dipilih untuk mengukur kinerja, 3) menghasilkan informasi yang berguna bagi pengambilan keputusan atas suatu program atau kebijakan, 4) menghasilkan data secara konsisten dari waktu ke waktu, 5) melaporkan hasil (*outcomes*) dan mempublikasikannya secara teratur.

Akuntansi dan pelaporan keuangan suatu unit pemerintahan, menyajikan informasi keuangan yang berguna untuk membuat keputusan ekonomi, politik dan sosial. Pemakai informasi keuangan unit pemerintah adalah pemerintah, investor dan kreditor, masyarakat, pihak-pihak lain yang berkepentingan terhadap laporan keuangan tersebut. Informasi keuangan yang dibutuhkan adalah informasi mengenai apakah operasi keuangan dijalankan dengan baik, apakah pelaporan keuangan dari suatu audit entitas disajikan secara wajar dan apakah entitas tersebut telah mentaati hukum dan peraturan yang ada, dan untuk melihat akuntabilitas secara riil, menilai integritas, kinerja dan pertanggungjawaban aktivitas pemerintah. Guna memenuhi kebutuhan para pemakai tersebut, informasi keuangan yang disajikan dalam laporan keuangan perlu diaudit, hal tersebut dijalankan oleh auditor dalam melakukan pemeriksaan untuk mencapai kualitas audit yang baik. Dalam rangka meningkatkan kinerja instansi Inspektor Gowa, diperlukan adanya prinsip akuntabilitas dan transparansi dalam pengelolaan keuangan daerah.

Terkait akuntabilitas, sejak tahun 2015 Kabupaten Gowa terpilih sebagai pengelola keuangan desa terbaik bersama dengan 14 kabupaten di Indonesia yang berlangsung di Istana Negara dan telah memperoleh apresiasi yang sangat baik dari Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK).

Penelitian berkaitan dengan penyajian dan aksesibilitas laporan keuangan daerah telah dilakukan dalam penelitian-penelitian terdahulu. Penelitian Wahida (2015) yang membuktikan bahwa penyajian laporan keuangan dan aksesibilitas laporan keuangan daerah secara parsial dan simultan berpengaruh positif dan signifikan terhadap akuntabilitas pengelolaan keuangan daerah Kabupaten Konawe Utara. Selain itu, penelitian sebelumnya telah dilakukan oleh Christy Natalia Lewier (2015). Sedangkan menurut penelitian yang dilakukan oleh Ratih Muji Astuti (2013) menyimpulkan bahwa transparansi dan akuntabilitas tidak berpengaruh terhadap kinerja pemerintah daerah. Sedangkan Fungsi pemeriksaan intern berpengaruh terhadap kinerja pemerintah daerah. Penelitian serupa dilakukan oleh Sande (2013) dimana hasil penelitian tersebut membuktikan bahwa penyajian laporan keuangan dan aksesibilitas laporan keuangan berpengaruh signifikan positif terhadap akuntabilitas pengelolaan keuangan daerah Pemerintah Provinsi Sumatera Barat.

Alasan dipilihnya Kabupaten Gowa adalah diantaranya yaitu opini WDP atas LKPD Kabupaten Gowa pada tahun 2012. Pada saat pengambilan data awal masih menggunakan data tahun 2012 dimana saat

itu status Kabupaten Gowa masih WDP, kemudian dilakukan pengambilan data lanjutan dimana sudah terjadi perubahan status dari opini WDP menjadi WTP (Wajar Tanpa Pengecualian) selama 7 kali berturut-turut yakni mulai tahun 2013 sampai tahun 2019. Opini wajar tanpa pengecualian diberikan oleh auditor jika auditor tidak menemukan kesalahan yang material secara keseluruhan dari laporan keuangan dan laporan keuangan dibuat sesuai dengan prinsip akuntansi yang berlaku (SAK). Laporan keuangan akan mendapatkan opini wajar tanpa pengecualian jika memenuhi kondisi seperti berikut: 1) laporan keuangan lengkap, 2) bukti audit yang dibutuhkan lengkap, 3) standar umum telah diikuti sepenuhnya dalam perikatan kerja, 4) laporan keuangan disajikan sesuai dengan prinsip akuntansi yang berlaku dan konsisten, 5) tidak terdapat ketidakpastian yang cukup berarti mengenai perkembangan di masa depan (*going concern*).

Terkait dengan transparansi, berdasarkan data yang diperoleh dari website resmi pemerintah daerah Kabupaten Gowa (<http://gowakab.go.id/>) dapat diketahui bahwa anggaran pendapatan dan belanja daerah (APBD) tahun 2018-2020 dan laporan keuangan pemerintah daerah (LKPD) kabupaten gowa tahun 2017-2019 telah dipublish. Laporan keuangan pemerintah daerah (LKPD) terdiri atas laporan realisasi anggaran (LRA), laporan perubahan saldo anggaran lebih (LP-SAL), neraca, laporan operasional, laporan arus kas, serta laporan perubahan equitas (LPE).

Penelitian lainnya dilakukan oleh Aliyah dan Nahar (2012) dengan

judul pengaruh penyajian laporan keuangan daerah dan aksesibilitas laporan keuangan daerah terhadap transparansi dan akuntabilitas pengelolaan keuangan daerah Kabupaten Jepara. Penelitian tersebut membuktikan bahwa penyajian laporan keuangan daerah dan aksesibilitas laporan keuangan daerah secara terpisah dan bersama-sama berpengaruh positif dan signifikan terhadap transparansi dan akuntabilitas pengelolaan keuangan daerah Kabupaten Jepara.

Referensi yang dijadikan acuan dalam penelitian bersumber dari beberapa jurnal dan penelitian sebelumnya. Diantaranya yaitu penelitian yang telah dilakukan oleh Wahida (2015) di daerah Konawe Utara serta jurnal yang ditulis oleh Christy Natalia Lewier (2015) di Kabupaten Klaten. Perbedaan penelitian ini dengan penelitian sebelumnya terletak pada lokasi penelitian, variabel independen dan variabel dependen. Lokasi penelitian ini dilakukan di lokasi yang berbeda yaitu Kabupaten Gowa. Variabel independen terdiri atas akuntabilitas pengelolaan keuangan daerah dan transparansi pengelolaan keuangan daerah. Sedangkan variabel dependennya yaitu kinerja pemerintah daerah. Pada penelitian yang telah dilakukan oleh Wahida (2015) di Konawe Utara dan Christy Natalia Lewier (2015) di Kabupaten Klaten variabel independennya terdiri dari penyajian laporan keuangan daerah dan aksesibilitas laporan keuangan daerah, sedangkan variabel dependennya yaitu akuntabilitas pengelolaan keuangan daerah.

Berdasarkan uraian di atas, maka penulis tertarik untuk melakukan penelitian dengan judul : “Analisis Pengaruh Akuntabilitas Dan Transparansi Pengelolaan Keuangan Daerah Terhadap Kinerja Pemerintah Daerah Di Kabupaten Gowa”.

Selain itu, penelitian mengenai analisis pengaruh akuntabilitas dan transparansi pengelolaan keuangan daerah terhadap kinerja pemerintah daerah ini belum pernah dilakukan di Kabupaten Gowa.

1.2 Rumusan Masalah

Berdasarkan pemaparan pada latar belakang penelitian tentang pengaruh akuntabilitas dan transparansi pengelolaan keuangan daerah terhadap kinerja pemerintah daerah di Kabupaten Gowa, penelitian ini dapat dirumuskan dengan pertanyaan sebagai berikut :

1. Apakah akuntabilitas pengelolaan keuangan daerah berpengaruh terhadap kinerja pemerintah daerah.
2. Apakah transparansi pengelolaan keuangan daerah berpengaruh terhadap kinerja pemerintah daerah.

1.3 Tujuan Penelitian

Berdasarkan dari rumusan masalah yang diangkat dan dibahas dalam penelitian ini maka dapat diketahui tujuan yang hendak dicapai. Adapun tujuan dilakukan penelitian ini sebagai berikut :

1. Untuk mengetahui dan menganalisis pengaruh akuntabilitas pengelolaan keuangan daerah terhadap kinerja pemerintah daerah.
2. Untuk mengetahui dan menganalisis pengaruh transparansi pengelolaan keuangan daerah terhadap kinerja pemerintah daerah.

1.4 Manfaat Penelitian

1. Bagi Pemerintah

Penelitian ini akan memberikan manfaat bagi pemerintah dalam hal pengelolaan keuangan daerah sehingga dapat mempertanggung jawabkan atas dana yang dikelolanya yang berasal dari masyarakat. Manfaat lain dengan adanya penelitian ini yang terkait dengan akuntabilitas laporan keuangan maka pemerintah dapat mengetahui betapa penting akuntabilitas dalam laporan keuangan, dimana dalam penelitian ini akan dapat diketahui alasan pentingnya akuntabilitas laporan keuangan dan faktor apa saja yang dapat mendukung terbentuknya akuntabilitas dari laporan keuangan. Maka dengan penelitian diharapkan dapat membantu pemerintah menerapkan pemerintahan yang akuntabel dan transparan sehingga terpercaya oleh masyarakatnya.

2. Bagi Masyarakat

Apabila pemerintah menyadari pentingnya pemerintah yang akuntabel dan transparan maka masyarakat sebagai pihak yang

memberikan amanah akan dapat mengawasi secara langsung terhadap penggunaan dana yang berasal dari mereka serta mengawasi kinerja dari pemerintah, selain itu adanya transparansi yang diterapkan pemerintah akan mempermudah masyarakat mengakses laporan pertanggung jawaban dari pemerintah yang berbentuk laporan keuangan. Terwujudnya transparansi dalam pemerintahan akan membantu masyarakat ikut berperan aktif dalam pemerintahan sebagai pihak pengendali dan pengawas. Adanya peran dari masyarakat tersebut maka akan dapat mewujudkan pemerintahan akuntabel yang dapat dipercaya mengemban amanah masyarakat.

3. Bagi Akademisi

Dalam penelitian ini penulis mengharapkan dapat member masukan dan tambahanin formasi mengenai akuntansi sektor publik yang berkaitan dengan akuntabilitas laporan keuangan pemerintah dan faktor-faktor yang mempengaruhi akuntabilitas laporan keuangan pemerintah serta dapat dijadikan referensi bagi para peneliti yang akan meneliti lebih lanjut berkaitan dengan masalah ini, dan untuk menambah perbendaharaan perpustakaan perguruan tinggi.

4. Bagi Peneliti

Penelitian ini membantu peneliti dalam memahami permasalahan akuntabilitas laporan keuangan sektor publik serta menambah wawasan yang lebih luas terhadap faktor-faktor yang mempengaruhi akuntabilitas laporan keuangan pemerintah.

5. Bagi Sektor lain.

Penelitian ini adalah penelitian studi kasus sehingga hasil temuan yang diperoleh dalam penelitian ini dilakukan dapat digunakan/diterapkan pada sektor lain sepanjang memiliki kasus yang sama.

BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

2.1 Tinjauan Teoritis

2.1.1 Teori Stewardship

Grand theory yang mendasari penelitian ini adalah bagian dari agency theory yaitu stewardship theory (Donaldson dan Davis, 1991), yang menggambarkan situasi dimana para manajemen tidaklah termotivasi oleh tujuan-tujuan individu tetapi lebih ditujukan pada sasaran hasil utama mereka untuk kepentingan organisasi. Teori tersebut mengasumsikan bahwa adanya hubungan yang kuat antara kepuasan dan kesuksesan organisasi. Kesuksesan organisasi menggambarkan maksimalisasi utilitas kelompok principals dan manajemen. Maksimalisasi utilitas kelompok ini pada akhirnya akan memaksimumkan kepentingan individu yang ada dalam kelompok organisasi tersebut.

Teori stewardship dapat diterapkan pada penelitian akuntansi organisasi sektor publik seperti organisasi pemerintahan (Morgan, 1996; David, 2006 dan Thorton, 2009) dan non profit lainnya (Vargas, 2004; Caers Ralf, 2006 dan Wilson, 2010) yang sejak awal perkembangannya, akuntansi sektor publik telah dipersiapkan untuk memenuhi kebutuhan informasi bagi hubungan antara stewards dengan principals. Akuntansi sebagai penggerak (*driver*) berjalannya transaksi bergerak ke arah yang

semakin kompleks dan diikuti dengan tumbuhnya spesialisasi dalam akuntansi dan perkembangan organisasi sektor publik. Kondisi semakin kompleks dengan bertambahnya tuntutan akan akuntabilitas pada organisasi sektor publik, principal semakin sulit untuk melaksanakan sendiri fungsi-fungsi pengelolaan. Pemisahan antara fungsi kepemilikan dengan fungsi pengelolaan menjadi semakin nyata. Berbagai keterbatasan, pemilik sumber daya (*capital suppliers/principals*) mempercayakan (*trust* = amanah) pengelolaan sumber daya tersebut kepada pihak lain (*steward* = manajemen) yang lebih capable dan siap. Kontrak hubungan antara steward dan principals atas dasar kepercayaan (amanah = *trust*), bertindak kolektif sesuai dengan tujuan organisasi, sehingga model yang sesuai pada kasus organisasi sektor publik adalah *stewardship theory*.

Implikasi teori *stewardship* terhadap penelitian ini, dapat menjelaskan eksistensi Pemerintah Daerah sebagai suatu lembaga yang dapat dipercaya untuk bertindak sesuai dengan kepentingan publik dengan melaksanakan tugas dan fungsinya dengan tepat, membuat pertanggungjawaban keuangan yang diamanahkan kepadanya, sehingga tujuan ekonomi, pelayanan publik maupun kesejahteraan masyarakat dapat tercapai secara maksimal. Untuk melaksanakan tanggung jawab tersebut maka *stewards* (manajemen dan auditor internal) mengarahkan semua kemampuan dan keahliannya dalam mengefektifkan pengendalian

intern untuk dapat menghasilkan laporan informasi keuangan yang berkualitas.

2.1.2 Akuntabilitas Pengelolaan Keuangan Daerah

Keputusan Kepala Lembaga Administrasi Negara (LAN) No.589/IX/6/Y/99 dalam Sitompul (2003), akuntabilitas diartikan sebagai kewajiban untuk memberikan pertanggungjawaban atau untuk menjawab dan menjelaskan kinerja dan tindakan seseorang/badan hukum/pimpinan kolektif suatu organisasi kepada pihak yang memiliki hak/berkewenangan untuk meminta keterangan atau pertanggungjawaban. Oleh karena itu, pemberlakuan undang-undang otonomi daerah harus dapat meningkatkan daya inovatif dari pemerintah daerah untuk dapat memberikan laporan pertanggung jawaban mengenai pengelolaan keuangan daerah dari segi efisiensi dan efektivitas kepada DPRD maupun masyarakat luas. Kualitas Pemerintahan Daerah yang baik (*good governance*) tidak hanya ditentukan oleh akuntabilitas, transparansi, partisipasi masyarakat dan supremasi hukum. Namun, kualitas pemerintahan yang baik juga ditentukan oleh faktorfaktor lain seperti *responsiveness*, *consensusorientation*, *equity efficiency*, *effectiveness* dan *strategic vision*. Hal ini sesuai dengan karakteristik pelaksanaan pemerintahan yang baik menurut UNDP dan World Bank

Akuntabilitas pengelolaan keuangan daerah merupakan proses pengelolaan keuangan daerah mulai dari perencanaan, pelaksanaan,

penatausahaan, pertanggungjawaban, serta pengawasan yang benar-benar dapat dilaporkan dan dipertanggungjawabkan kepada DPRD dan masyarakat terkait dengan kegagalan maupun keberhasilannya sebagai bahan evaluasi tahun berikutnya. Masyarakat tidak hanya memiliki hak untuk mengetahui pengelolaan keuangan tetapi berhak untuk menuntut pertanggungjawaban atas pengaplikasian serta pelaksanaan pengelolaan keuangan daerah tersebut (Halim, 2007).

Dimensi akuntabilitas yang harus dipenuhi oleh organisasi publik antara lain, yaitu: (1) akuntabilitas kejujuran dan akuntabilitas hukum yaitu akuntabilitas kejujuran terkait dengan penghindaran penyalahgunaan jabatan (*abuse of power*), sedangkan akuntabilitas hukum terkait dengan jaminan adanya kepatuhan terhadap hukum dan peraturan lain yang disyaratkan dalam penggunaan sumber dan public; (2) akuntabilitas proses yaitu terkait dengan apakah prosedur yang telah digunakan dalam melaksanakan tugas sudah cukup baik dalam hal kecukupan sistem informasi akuntansi, sistem informasi manajemen dan prosedur administrasi. Akuntabilitas proses termanifestasikan melalui pemberian pelayanan publik yang cepat, responsif, dan murah biaya. 3. Akuntabilitas Program yaitu terkait dengan pertimbangan apakah tujuan yang ditetapkan dapat dicapai atau tidak dan apakah telah mempertimbangkan alternatif program yang memberikan hasil optimal dengan biaya yang minimal. 4. Akuntabilitas Kebijakan yaitu terkait dengan pertanggungjawaban pembina, pengurus dan pengawas atas kebijakan-

kebijakan yang diambil. Katz (2004) menyatakan bahwa transparansi merupakan proses demokrasi yang esensial dimana setiap warga negara dapat melihat secara terbuka dan jelas atas aktivitas dari pemerintah mereka daripada membiarkan aktivitas tersebut dirahasiakan. Jiwa dari sistem ini adalah kemampuan dari setiap warga negara untuk memperoleh informasi melalui akuntabilitas pejabat pemerintah atas kegiatan yang mereka lakukan.

Peraturan Pemerintah No. 71 Tahun 2010 berbasis Akruwal tentang Standar Akuntansi Pemerintahan dinyatakan bahwa komponen yang harus terdapat dalam suatu Laporan Keuangan Pemerintah Daerah meliputi: Laporan Realisasi Anggaran, Laporan Perubahan Saldo Anggaran Lebih, Neraca, Laporan Operasional, Laporan Arus Kas, Laporan Perubahan Ekuitas, dan Catatan atas Laporan Keuangan. Dari uraian di atas dapat disimpulkan bahwa akuntabilitas pengelolaan keuangan daerah adalah pertanggungjawaban pemerintah daerah berkenaan dengan pengelolaan keuangan daerah kepada publik secara terbuka dan jujur melalui media berupa penyajian laporan keuangan yang dapat diakses oleh berbagai pihak yang berkepentingan dengan anggapan bahwa publik berhak mengetahui informasi tersebut.

2.1.3 Transparansi Pengelolaan Keuangan Daerah

Transparansi adalah memberikan informasi yang terbuka dan jujur kepada masyarakat berdasarkan pertimbangan bahwa masyarakat

memiliki hak untuk mengetahui secara terbuka dan menyeluruh atas pertanggungjawaban pemerintah dalam pengelolaan sumber daya yang dipercayakan kepadanya dan ketaatannya pada peraturan perundang-undangan (KK, SAP,2005).

Transparansi adalah bahwa prosedur atau tata cara, penyelenggaraan pemerintahan dan hal-hal lain yang berkaitan dengan proses pelayanan umum wajib diinformasikan secara terbuka agar mudah diketahui dan dipahami oleh masyarakat, baik diminta maupun tidak diminta. (Ratminto dan Atik Septi Winarsih, 2009).

Transparansi menurut Marisi Purba (2012) adalah keterbukaan informasi baik dalam pengambilan keputusan maupun pengungkapan informasi yang material dan yang relevan dengan perusahaan. Selain itu transparansi menurut Mahmudi (2011) yaitu keterbukaan organisasi dalam memberikan informasi yang terkait dengan aktivitas pengelolaan sumber daya publik kepada pihak-pihak yang menjadi pemangku kepentingan. Transparansi adalah prinsip yang menjamin akses atau kebebasan setiap orang untuk memperoleh informasi tentang penyelenggaraan pemerintahan, yakni informasi tentang kebijakan, proses pembuatan dan pelaksanaannya, serta hasil- hasil yang dicapai (Buku Pedoman Penguatan Pengamanan Program Pembangunan Daerah, Badan Perencanaan Pembangunan Nasional & Departemen Dalam Negeri, 2002). Menurut Andrianto (2007) transparansi adalah keterbukaan secara sungguh-sungguh, menyeluruh, dan memberi tempat bagi partisipasi aktif

dari seluruh lapisan masyarakat dalam proses pengelolaan sumber daya publik.

Menurut Hafiz (2000) transparansi adalah keterbukaan dan kejujuran kepada masyarakat berdasarkan pertimbangan bahwa masyarakat memiliki hak untuk mengetahui secara terbuka dan menyeluruh atas pertanggung jawaban pemerintahan dalam sumber daya yang di percayakan kepadanya dan ketaatannya pada peraturan perundang-undangan.

Pemerintah daerah harus bisa menyusun laporan keuangan sesuai standar akuntansi yang diterima umum dan memenuhi karakteristik kualitatif laporan keuangan. Semakin baik penyajian laporan keuangan tentu akan semakin memperjelas pelaporan keuangan pemerintah daerah karena semua transaksi keuangan dilakukan sesuai dengan peraturan yang ada dan akan disajikan dengan lengkap dan jujur dalam laporan keuangan pemerintah daerah. Penyajian informasi yang utuh dalam laporan keuangan akan menciptakan transparansi dan nantinya akan mewujudkan akuntabilitas.

2.1.4 Akuntabilitas

Dalam dunia birokrasi, akuntabilitas suatu instansi pemerintah itu merupakan perwujudan kewajiban instansi pemerintah untuk mempertanggungjawabkan keberhasilan atau kegagalan pelaksanaan misi instansi bersangkutan. Asas akuntabilitas menetapkan bahwa setiap

kegiatan dan hasil akhir dari kegiatan penyelenggaraan negara harus dapat dipertanggungjawabkan kepada rakyat sebagai pemegang kedaulatan tertinggi dalam suatu negara. Ada beberapa definisi tentang akuntabilitas di antaranya adalah:

Menurut Mardiasmo (2012), akuntabilitas publik adalah kewajiban pihak pemegang amanah untuk memberikan pertanggungjawaban, menyajikan, melaporkan, dan mengungkapkan segala aktivitas dan kegiatan yang menjadi tanggungjawabnya kepada pihak pemberi amanah (*principal*) yang memiliki hak dan kewenangan untuk menerima pertanggungjawaban tersebut.

Menurut Pedoman Penguatan Pengamanan Program Pembangunan Daerah Bappenas & Depdagri (2002), akuntabilitas publik adalah prinsip yang menjamin bahwa setiap kegiatan penyelenggaraan pemerintahan dapat dipertanggung jawabkan secara terbuka oleh pelaku kepada pihak-pihak yang terkena dampak penerapan kebijakan.

Menurut Mahmudi (2016), akuntabilitas publik adalah kewajiban pemegang amanah (*agent*) untuk memberikan pertanggungjawaban, menyajikan, melaporkan, dan mengungkapkan segala aktivitas dan kegiatan yang menjadi tanggungjawabnya kepada pihak pemberi amanah (*principal*) yang memiliki hak dan kewenangan untuk meminta pertanggungjawaban tersebut. Dari pengertian di atas dapat disimpulkan bahwa akuntabilitas publik adalah suatu pertanggungjawaban kepada masyarakat atau lembaga-lembaga yang bersangkutan dalam

menjalankan aktifitasnya atau tanggung jawabnya.

Dalam ranah keuangan publik, UU No. 17 Tahun 2003 menuntut adanya transparansi dan akuntabilitas dalam keuangan publik. Laporan keuangan memang merupakan salah satu hasil dari transparansi dan akuntabilitas keuangan publik, dan ini berarti laporan keuangan yang disusun harus memenuhi syarat akuntabilitas dan transparansi. Laporan keuangan yang disajikan pemerintah harus mengandung informasi yang relevan, jujur dan terbuka kepada masyarakat. Hal ini karena organisasi sektor publik merupakan organisasi yang menggunakan dana publik yang harus diberikan pertanggungjawaban melalui laporan keuangan sebagai wujud akuntabilitas. Pemerintah daerah harus bisa menyusun laporan keuangan yang sesuai dengan standar akuntansi dan memenuhi karakteristik kualitatif laporan keuangan.

a. Sifat Akuntabilitas

Laporan keuangan pemerintah harus menyediakan informasi yang dapat dipakai oleh pengguna laporan keuangan untuk menilai akuntabilitas pemerintahan dalam membuat keputusan ekonomi, sosial dan politik. Akuntabilitas diartikan sebagai hubungan antara pihak yang memegang kendali dan mengatur entitas dengan pihak yang memiliki kekuatan formal atas pihak pengendali tersebut. Dalam hal ini dibutuhkan juga pihak ketiga yang *accountable* untuk memberikan penjelasan atau alasan yang masuk akal terhadap seluruh kegiatan yang dilakukan dan hasil usaha yang diperoleh sehubungan dengan pelaksanaan suatu tugas

dan pencapaian suatu tujuan tertentu.

Dalam konteks penyelenggaraan pemerintahan, akuntabilitas pemerintah tidak dapat diketahui tanpa pemerintah memberitahukan kepada rakyat tentang informasi sehubungan dengan pengumpulan sumber daya dan sumber dana masyarakat beserta penggunaannya. Akuntabilitas dapat dipandang dari berbagai perspektif. Dari perspektif akuntansi, *American Accounting Association* menyatakan bahwa akuntabilitas suatu entitas pemerintahan dapat dibagi dalam empat kelompok, yaitu akuntabilitas terhadap: (1) sumber daya financial; (2) kepatuhan terhadap aturan hukum dan kebijaksanaan administrasi; (3) efisiensi dan ekonominya suatu kegiatan; (4) hasil program dan kegiatan pemerintah yang tercermin dalam pencapaian tujuan, manfaat dan efektivitas.

Sedangkan dari perspektif fungsional, akuntabilitas dilihat sebagai suatu tingkatan dengan lima tahap yang berbeda yang diawali dari tahap yang lebih banyak membutuhkan ukuran-ukuran obyektif (*legal compliance*) ke tahap yang membutuhkan lebih banyak ukuran-ukuran subyektif. Tahap-tahap tersebut adalah: (1) *probity and legality accountability* yaitu menyangkut pertanggungjawaban penggunaan dana sesuai dengan anggaran yang telah disetujui dan sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku (*compliance*); (2) *process accountability* dalam hal ini digunakan proses, prosedur, atau ukuran-ukuran dalam melaksanakan kegiatan yang ditentukan (*planning,*

allocating and managing); (3) *performance accountability*, pada level ini dilihat apakah kegiatan yang dilakukan sudah efisien (*efficient and economy*).

Akuntabilitas pemerintahan di negara yang menganut paham demokrasi sebenarnya tidak lepas dari prinsip dasar demokrasi yaitu kedaulatan adalah di tangan rakyat. Pemerintahan demokrasi menjalankan dan mengatur kehidupan rakyat dalam bernegara dengan mengeluarkan sejumlah aturan serta mengambil dan menggunakan sumber dana masyarakat. Pemerintah wajib memberikan pertanggungjawabannya atas semua aktivitasnya kepada masyarakat. Seiring dengan meningkatnya aktivitas pemerintah dalam pengaturan perdagangan dan industri, perlindungan hak asasi dan menciptakan sistem pertanggungjawaban pemerintah yang lebih komprehensif. Sistem tersebut antara lain meliputi sistem anggaran pendapatan dan belanja, organisasi pelayanan pemerintah, manajemen wilayah yang profesional serta pengembangan praktik akuntansi dan pelaporan keuangan.

Ternyata dalam pelaksanaannya, keingintahuan masyarakat tentang akuntabilitas pemerintahan tidak dapat dipenuhi hanya dengan informasi keuangan saja. Masyarakat ingin tahu lebih jauh apakah pemerintah yang dipilihnya telah beroperasi dengan ekonomis, efisien dan efektif. Beberapa teknik yang dikembangkan untuk memperkuat sistem akuntabilitas sangat dipengaruhi oleh metode yang banyak dipakai dalam akuntansi, manajemen dan riset seperti *management by*

objectives, anggaran kinerja, riset operasi, audit kepatuhan dan kinerja, akuntansi biaya, analisis keuangan dan survey yang dilakukan terhadap masyarakat sendiri. Teknik-teknik tersebut tentunya juga dipakai oleh pemerintah sendiri untuk meningkatkan kinerjanya.

b. Ciri-Ciri Pemerintahan Akuntabel

Finner dan Widodo (2011) menjelaskan akuntabilitas sebagai konsep yang berkenaan dengan standar eksternal yang menentukan kebenaran suatu tindakan birokrasi. Pengendalian dari luar (*external control*) menjadi sumber akuntabilitas yang memotivasi dan mendorong aparat untuk bekerja keras. Masyarakat luas sebagai penilai objektif yang akan menentukan *accountable* atau tidaknya sebuah birokrasi.

Terdapat beberapa ciri pemerintahan yang *accountable* di antaranya sebagai berikut: (1) mampu menyajikan informasi penyelenggaraan pemerintah secara terbuka, cepat, dan tepat kepada masyarakat; (2) mampu memberikan pelayanan yang memuaskan bagi publik; (3) mampu menjelaskan dan mempertanggungjawabkan setiap kebijakan publik secara proposional; (4) mampu memberikan ruang bagi masyarakat untuk terlibat dalam proses pembangunan dan pemerintahan; (5) adanya sasaran bagi publik untuk menilai kinerja (*performance*) pemerintah. Dengan pertanggungjawaban publik, masyarakat dapat menilai derajat pencapaian pelaksanaan program/kegiatan pemerintah.

c. Macam-Macam Akuntabilitas

Dalam Akuntabilitas publik ada dua macam akuntabilitas diantaranya Akuntabilitas Vertikal (*vertical accountability*) dan Akuntabilitas Horizontal (*horizontal accountability*) yang mempunyai definisi sebagai berikut: (a) akuntabilitas vertikal (*vertical accountability*) yaitu pertanggungjawaban atas pengelolaan dana kepada otoritas yang lebih tinggi, misalnya pertanggungjawaban unit – unit kerja (dinas) kepada pemerintah daerah, pertanggungjawaban pemerintah daerah kepada pemerintah pusat, dan pemerintah pusat kepada MPR; (b) akuntabilitas horizontal (*horizontal accountability*) adalah pertanggung jawaban pada masyarakat luas.

d. Dimensi Akuntabilitas

Dimensi akuntabilitas yang harus dipenuhi oleh lembaga-lembaga publik tersebut antara lain (Hopwood dan Tomkins, 1984, Elwood, 1993 dalam Mahmudi (2011)):

a. Akuntabilitas Hukum dan Kejujuran

Akuntabilitas hukum dan kejujuran adalah akuntabilitas lembaga- lembaga publik untuk berperilaku jujur dalam bekerja dan menaati ketentuan hukum yang berlaku. Penggunaan dana publik harus dilakukan secara benar dan telah mendapatkan otorisasi. Akuntabilitas hukum berkaitan dengan kepatuhan terhadap hukum dan peraturan lain yang disyaraktan dalam menjalankan organisasi, sedangkan akuntabilitas kejujuran berkaitan dengan

penghindaran penyalahgunaan jabatan (*abuse of power*), korupsi dan kolusi. Akuntabilitas hukum menuntut penegakan hukum (*law enforcement*), sedangkan akuntabilitas kejujuran menuntut adanya praktik organisasi yang sehat tidak terjadi malpraktek dan maladministrasi.

b. Akuntabilitas Proses (*Process Accountability*)

Akuntabilitas proses terkait dengan prosedur yang digunakan dalam melaksanakan tugas sudah cukup baik dalam hal kecukupan sistem informasi akuntansi, system informasi manajemen, dan prosedur administrasi. Akuntabilitas proses termanifestasikan melalui pemberian pelayanan publik yang cepat responsif, dan biaya yang murah.

c. Akuntabilitas Program (*Program Accountability*)

Akuntabilitas program berkaitan dengan pertimbangan apakah tujuan yang ditetapkan dapat dicapai atau tidak, dan apakah organisasi telah mempertimbangkan alternatif program yang memberikan hasil yang optimal dengan biaya yang minimal. Lembaga-lembaga publik harus mempertanggungjawabkan program yang telah dibuat sampai pada pelaksanaan program. Dengan kata lain akuntabilitas program berarti bahwa program-program organisasi hendaknya merupakan program yang bermutu yang mendukung strategi dan pencapaian misi, visi, dan tujuan organisasi.

d. Akuntabilitas Kebijaksanaan (*Policy Accountability*)

Akuntabilitas kebijakan terkait dengan pertanggungjawaban lembaga publik atas kebijakan-kebijakan yang diambil. Lembaga-lembaga publik hendaknya dapat mempertanggungjawabkan kebijakan yang telah ditetapkan dengan mempertimbangkan dampak dimasa depan. Dalam membuat kebijakan harus mempertimbangkan apa tujuan kebijakan tersebut, mengapa kebijakan itu diambil, siapa sasarannya, pemangku kepentingan (*stakeholder*) mana yang akan terpengaruh dan memperoleh manfaat dan dampak (negatif) atas kebijakan tersebut.

e. Indikator Akuntabilitas

Dari dimensi akuntabilitas yang telah di jelaskan dan disebutkan di atas yang bersumber dari Hopwood dan Tomkins (1984), Elwood (1993) dalam Mahmudi (2011) dimensi tersebut dapat di turunkan menjadi indikator akuntabilitas adalah sebagai berikut: (a) akuntabilitas hukum dan kejujuran (kepatuhan terhadap hukum dan penghindaran korupsi dan kolusi); (b) akuntabilitas proses (adanya kepatuhan terhadap prosedur, adanya pelayanan publik yang responsive, adanya pelayanan publik yang cermat, dan adanya pelayanan publik dengan biaya murah); (c) akuntabilitas program (alternatif program yang memberikan hasil yang optimal dan

mempertanggungjawabkan yang telah dibuat); (d) akuntabilitas kebijakan (mempertanggungjawabkan kebijakan yang telah diambil serta mempertimbangkan dampak di masa depan).

2.1.5 Transparansi

Transparansi dibangun atas dasar arus informasi yang bebas. Seluruh proses pemerintahan, lembaga-lembaga, dan informasi perlu dapat diakses oleh pihak-pihak yang berkepentingan dan informasi yang tersedia harus memadai agar dapat dimengerti dan dipantau.

Transparansi adalah memberikan informasi yang terbuka dan jujur kepada masyarakat berdasarkan pertimbangan bahwa masyarakat memiliki hak untuk mengetahui secara terbuka dan menyeluruh atas pertanggungjawaban pemerintah dalam pengelolaan sumber daya yang dipercayakan kepadanya dan ketaatannya pada peraturan perundang-undangan. Transparansi adalah bahwa prosedur atau tata cara, penyelenggaraan pemerintahan dan hal-hal lain yang berkaitan dengan proses pelayanan umum wajib diinformasikan secara terbuka agar mudah diketahui dan dipahami oleh masyarakat, baik diminta maupun tidak diminta.

Transparansi menurut Marisi Purba (2012) adalah keterbukaan informasi baik dalam pengambilan keputusan maupun pengungkapan informasi yang material dan yang relevan dengan perusahaan. Selain itu Transparansi menurut Mahmudi (2011) yaitu keterbukaan organisasi

dalam memberikan informasi yang terkait dengan aktivitas pengelolaan sumber daya publik kepada pihak-pihak yang menjadi pemangku kepentingan. Transparansi adalah prinsip yang menjamin akses atau kebebasan setiap orang untuk memperoleh informasi tentang penyelenggaraan pemerintahan, yakni informasi tentang kebijakan, proses pembuatan dan pelaksanaannya, serta hasil- hasil yang dicapai (Buku Pedoman Penguatan Pengamanan Program Pembangunan Daerah, Badan Perencanaan Pembangunan Nasional & Departemen Dalam Negeri, 2002)

Menurut Andrianto (2007), transparansi adalah keterbukaan secara sungguh-sungguh, menyeluruh, dan memberi tempat bagi partisipasi aktif dari seluruh lapisan masyarakat dalam proses pengelolaan sumber daya publik. Menurut Hafiz (2000), transparansi adalah keterbukaan dan kejujuran kepada masyarakat berdasarkan pertimbangan bahwa masyarakat memiliki hak untuk mengetahui secara terbuka dan menyeluruh atas pertanggung jawaban pemerintahan dalam sumber daya yang di percayakan kepadanya dan ketaatannya pada peraturan perundang-undangan. Sedangkan menurut Mardiasmo (2002), transparansi yaitu keterbukaan pemerintah dalam membuat kebijakan-kebijakan keuangan daerah sehingga dapat diketahui dan diawasi oleh DPRD dan masyarakat.

Dari definisi di atas dapat ditarik kesimpulan bahwa transparansi merupakan keterbukaan pemerintah kepada masyarakat untuk

mengakses informasi berdasarkan pertimbangan bahwa masyarakat memiliki hak untuk mengetahui secara terbuka dan menyeluruh atas pertanggung jawaban pemerintah tersebut.

a. Indikator Transparansi

Prinsip yang menjamin akses atau kebebasan bagi setiap orang untuk memperoleh informasi tentang penyelenggaraan pemerintahan, yakni informasi mengenai kebijakan, proses pembuatan, pelaksanaan, dan hasil yang dicapai. Prinsip ini menekankan kepada 2 aspek yaitu: 1. Komunikasi publik oleh pemerintah; 2. Hak masyarakat terhadap akses informasi.

Menurut Krina (2003) indikator-indikator dari transparansi adalah sebagai berikut :1. Penyediaan informasi yang jelas tentang tanggung jawab; 2. Kemudahan akses informasi; 3. Menyusun suatu mekanisme pengaduan jika ada peraturan yang dilanggar atau permintaan untuk membayar uang suap; 4. Meningkatkan arus informasi melalui kerjasama dengan media massa dan lembaga non pemerintah.

2.1.6 Kinerja Pemerintah

Kinerja instansi atau organisasi merupakan indikator tingkatan prestasi yang dapat dicapai dan mencerminkan keberhasilan suatu organisasi, serta merupakan hasil yang dicapai dari perilaku anggota organisasi. Kinerja bisa juga dikatakan sebagai sebuah hasil (output) dari suatu proses tertentu yang dilakukan oleh seluruh komponen organisasi terhadap sumber-sumber tertentu yang digunakan (input). Selanjutnya,

kinerja juga merupakan hasil dari serangkaian proses kegiatan yang dilakukan untuk mencapai tujuan tertentu organisasi. Bagi suatu organisasi, kinerja merupakan hasil dari kegiatan kerjasama diantara anggota atau komponen organisasi dalam rangka mewujudkan tujuan organisasi. Supriyanto (2015) menyatakan bahwa kinerja perusahaan tidak cukup hanya diukur berdasarkan laba akuntansi saja, karena laba akuntansi tidak mempunyai makna riil apabila apabila tidak didukung oleh kemampuan perusahaan dalam meningkatkan nilai tambah secara ekonomis.

Mangkunegara (2010) menyebutkan bahwa kinerja dibedakan menjadi 2 (dua), yaitu: (1) kinerja individu adalah hasil kerja karyawan baik dari segi kualitas maupun kuantitas berdasarkan standar kerja yang telah ditentukan; (2) kinerja organisasi adalah gabungan dari kinerja individu dengan kinerja kelompok.

2.2 Hubungan antar Variabel

2.2.1 Hubungan Akuntabilitas dengan Kinerja Pemerintah

Akuntabilitas merupakan kemauan memberikan penjelasan dan justifikasi keinginan dan perbuatan kepada yang berkepentingan (Hunt, 2006). Berbeda dengan transparansi yakni mempertanggungjawabkan apa yang telah dilakukan dengan memberi informasi yang relevan atau laporan yang terbuka pada pihak luar atau organisasi mandiri (legislator, auditor, publik) dan dipublikasikan (Haryatmoko, 2013). Pada akhirnya,

unsur akuntabilitas menjadi suatu kebutuhan di dalam pengelolaan pemerintah termasuk bidang keuangan (Hudayah, 2012), khususnya dalam hal penyusunan anggaran berbasis kinerja. Dengan adanya penerapan akuntabilitas akan tercipta kinerja pemerintah yang lebih baik. Kinerja pemerintah berkaitan erat dengan akuntabilitas dan transparansi. Penerapan berbagai aturan perundang-undangan yang ada terkait dengan penerapan konsep akuntabilitas dan transparansi dalam pengelolaan keuangan diharapkan dapat mewujudkan pengelolaan pemerintah daerah yang baik dan berpihak kepada rakyat. Implementasi akuntabilitas dan transparansi dalam pengelolaan keuangan daerah ini diharapkan mampu meningkatkan kinerja pemerintah daerah.

2.2.2. Hubungan Transparansi dengan Kinerja Pemerintah

Kurniawan (2013) mengemukakan bahwa transparansi terwujud apabila pemerintah bersedia untuk menginformasikan kepada masyarakat/DPRD bagaimana dana publik digunakan/dikelola dalam kegiatan dan program pemerintah. Penelitian yang dilakukan oleh Hadyrianto (2012) yang berjudul pengaruh akuntabilitas dan transparansi pada pengelolaan anggaran di Universitas Bina Nusantara, menunjukkan bahwa transparansi berpengaruh positif terhadap pengelolaan anggaran.

Prinsip transparansi memiliki dua aspek dalam mewujudkan pemerintah yang terbuka akan informasi-informasi mengenai kebijakan yang dijalankan oleh pemerintah daerah, yaitu komunikasi publik oleh

pemerintah dan hak masyarakat terhadap akses informasi. Keduanya akan sangat sulit dilakukan jika pemerintah tidak menangani kinerjanya dengan baik. Manajemen kinerja yang baik adalah titik awal dari transparansi. Transparansi harus seimbang dengan kebutuhan akan kerahasiaan lembaga maupun informasi-informasi yang mempengaruhi hak privasi individu. Pemerintah daerah seharusnya perlu menyiapkan kebijakan yang jelas tentang cara mendapatkan informasi (Krina, 2013).

2.3 Penelitian Terdahulu

Berdasarkan penelitian yang dilakukan oleh Nadia Garini (2011) menyimpulkan bahwa secara simultan transparansi dan akuntabilitas berpengaruh terhadap kinerja Dinas di Kota Bandung. Transparansi dan akuntabilitas secara simultan memberikan kontribusi atau pengaruh sebesar 67,2% terhadap kinerja Dinas di Kota Bandung.

Menurut penelitian yang dilakukan oleh Ratih Muji Astuti (2013) menyimpulkan bahwa transparansi dan akuntabilitas tidak berpengaruh terhadap kinerja pemerintah daerah. Sedangkan fungsi pemeriksaan intern berpengaruh terhadap kinerja pemerintah daerah.

Berdasarkan penelitian yang dilakukan oleh Widya Martha (2014) pengujian hipotesis menunjukkan secara parsial dan simultan bahwa transparansi dan akuntabilitas berpengaruh signifikan terhadap kinerja instansi pemerintah. Besar pengaruh transparansi dalam memberikan kontribusi pengaruh terhadap kinerja instansi pemerintah sebesar 18,5%,

sedangkan akuntabilitas memberikan kontribusi pengaruh terhadap kinerja.

Penelitian yang dilakukan oleh Made Budi Sastra Wiguna (2015) menunjukkan bahwa bahwa : (1) pengawasan keuangan daerah berpengaruh signifikan terhadap kinerja Pemerintah Daerah Kabupaten Buleleng; (2) akuntabilitas pengelolaan keuangan berpengaruh signifikan terhadap kinerja Pemerintah Daerah Kabupaten Buleleng; (3) transparansi pengelolaan keuangan berpengaruh signifikan terhadap kinerja Pemerintah Daerah Kabupaten Buleleng; (4) pengawasan keuangan daerah, akuntabilitas dan transparansi pengelolaan keuangan berpengaruh signifikan terhadap kinerja Pemerintah Daerah Kabupaten Buleleng.